



Analisis
PAGU ANGGARAN
2025

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN: TREN ANGGARAN DAN TANTANGAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA

TREN ANGGARAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)

Pagu dan Realisasi Tahun 2020-2026 (Rp Miliar)



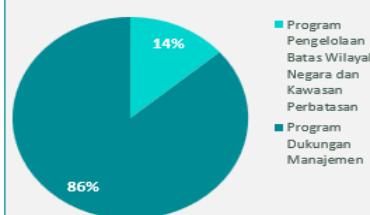
Sumber: LKPP 2020-2023, NK APBN 2025, NK RAPBN 2026

Perkembangan Belanja per Program (Rp Miliar)



Sumber: LKPP 2020-2023, NK APBN 2025, NK RAPBN 2026

Belanja Per Program Tahun 2026 (%)



Sumber: NK RAPBN 2026

Perkembangan Belanja per Jenis Belanja (Rp Miliar)



Sumber: LKPP 2020-2023, NK APBN 2024-2025, KEM PPKF 2026

Output Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan

No	Sasaran/Outcome	Rincian Output dan satunya	Tahun 2025	Tahun 2026
			Volume Target	Proyeksi Volume Target
1	Meningkatnya pengelolaan batas negara wilayah darat	Identifikasi Pilar Batas Negara Wilayah Darat, Kegiatan	1	1
2		Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara, Orang	100	100
3	Meningkatnya pengelolaan batas negarawilayah laut dan udara	Identifikasi Pilar Batas Negara Wilayah Laut, Kegiatan	1	1
4		Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Peduli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum Batas Wilayah Laut, Orang	50	100
5	Meningkatnya efektivitas pengelolaan potensi SDM dan SDA di kawasan perbatasan darat	Pemantauan dan evaluasi pembangunan wilayah Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Laporan	2	11
6	Meningkatnya efektivitas pengelolaan potensi SDM dan SDA di kawasan perbatasan Laut	Pemantauan dan evaluasi pembangunan wilayah Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut, Laporan	3	11
7	Meningkatnya akses layanan infrastruktur sosial dasar di kawasan perbatasan	Pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Lokasi Prioritas (IPPK Kecamatan Lokpri) di Kawasan Perbatasan	5	12
8		Dukungan penanggulangan stunting dan gerakan masyarakat sehat di kawasan perbatasan, Orang dan kegiatan	100	1
9	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Bimbing Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara, Orang	550	75
10	Meningkatnya pengelolaan batas negarawilayah laut dan udara	Koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan Serpas Hankam di PPKT tidak berpenduk, PPKT	-	-

Sumber: RKA KL RAPBN 2026, diolah.

Penurunan pagu anggaran 2026. Selama Periode 2020–2026, pagu anggaran menunjukkan tren meningkat secara umum. Pada 2020, pagu ditetapkan sebesar Rp213 miliar. Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp227,7 miliar, diikuti peningkatan pada 2022 menjadi Rp247,7 miliar. Kenaikan ini berlanjut hingga 2025 dengan pagu tertinggi Rp267,1 miliar. Namun, pada RAPBN 2026 pagu dialokasikan sebesar Rp258,1 miliar, mengalami penurunan dibanding 2025 sebesar 3,4%.

Kebijakan strategis 2026. Kebijakan strategis yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 antara lain: (1) Mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara; (2) Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerja sama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara; (3) Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan (4) Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara secara holistik, integratif, tematik serta berorientasi pada konektivitas antar ruang yang berkelanjutan.

Kinerja penyerapan yang membaik. Realisasi anggaran mengalami fluktuasi dengan penurunan tajam pada 2021, di mana serapan hanya 66,23%. Namun sejak 2022 tren kembali membaik dengan realisasi di atas 90%, bahkan mencapai 99,07% pada 2023 dan 99,57% pada 2024. Hal ini menunjukkan pemulihan yang kuat dalam kinerja penyerapan anggaran setelah sempat melemah.

Dominasi program dukungan manajemen. Sepanjang periode, program dukungan manajemen selalu menyerap lebih dari 80% belanja. Ditahun 2026 sendiri proporsi program ini hingga mencapai 86,3%. Tingginya porsi Dukungan Manajemen menunjukkan fokus besar pada kegiatan pendukung seperti aspek administratif, operasional, dan manajerial.

Belanja barang menjadi prioritas. Tren belanja Pemerintah berdasarkan jenis belanja dari 2020 hingga APBN 2025, di mana belanja barang konsisten mendominasi dengan kenaikan signifikan dari Rp167,57 miliar pada 2020 menjadi Rp204,42 miliar pada APBN 2025. Belanja pegawai relatif stabil dengan peningkatan bertahap dari Rp30,24 miliar (2020) menjadi Rp44,97 miliar (2025), sedangkan belanja modal cenderung fluktuatif, sempat mencapai Rp30,49 miliar pada 2023 lalu turun drastis menjadi Rp4,48 miliar di 2024 dan Rp17,74 miliar pada 2025. Secara keseluruhan, belanja barang menjadi prioritas utama, sementara belanja modal belum konsisten meski penting untuk mendorong pembangunan jangka panjang.

TANTANGAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA

Kawasan perbatasan negara merupakan wilayah yang secara strategis menjadi titik sentuh antara kedaulatan negara, keamanan nasional, serta dinamika sosial-ekonomi antarnegara. Pengelolaan kawasan perbatasan yang baik tidak hanya berfungsi menjaga integritas wilayah NKRI, tetapi juga berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan wilayah.

Gambar 1. Fokus Area Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2029
<ul style="list-style-type: none"> • 12 Provinsi • 38 Kab/Kota • 111 Lokpri <small>Peraturan BNPP No. 2 Tahun 2011 Tentang Renduk PBWN-KP Tahun 2011-2014</small>	<ul style="list-style-type: none"> • 13 Provinsi • 41 Kab/Kota • 187 Lokpri • 10 PKSN <small>Peraturan BNPP No. 1 Tahun 2015 Tentang Renduk PBWN-KP Tahun 2015-2019</small>	<ul style="list-style-type: none"> • 15 Provinsi • 54 Kab/Kota • 222 Lokpri • 18 PKSN • 49 PPKT • 26 PLBN <small>Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2022 Tentang Renduk PBWN-KP Tahun 2020-2024</small>	<ul style="list-style-type: none"> • 18 Provinsi • 74 Kab/Kota • 204 Kec. Perbatasan Prioritas (KPP) • 22 PKSN sebagai PPKP (9 Kec. Delinasi) • 26 PLBN (15 beroperasi; 3 usulan; 8 usulan baru)

Sumber: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), 2025

Sejak tahun 2020, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menetapkan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) sebagai alat ukur kinerja tata kelola kawasan perbatasan secara nasional. IPKP ini disusun untuk menilai efektivitas pengelolaan kawasan perbatasan berdasarkan lima dimensi yakni Infrastruktur dasar dan konektivitas, Pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik), Keamanan dan pengawasan wilayah perbatasan, Kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, dan Aktivitas ekonomi lokal dan fungsi PLBN. Rentang nilai IPKP berkisar antara 0 sampai 1, nilai yang mendekati angka 1 menunjukkan nilai yang baik atau positif.

BNPP mulai mengukur IPKP secara nasional sejak tahun 2020 pada 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Mulai tahun 2025, IPKP akan diperluas cakupannya menjadi 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi pengukuran kondisi faktual di lapangan, menyesuaikan penilaian dengan wilayah administratif terkecil, mendorong integrasi perencanaan pembangunan lintas sektor. Capaian rata-rata IKPP dalam rentang 2020-2024 mengalami peningkatan (Tabel 1).

Tabel 1. Perkembangan hasil IPKP 2020-2024

Hasil Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan			
Tahun	Rata-rata IPKP	Kategori	Keterangan
2020	0.44	Kurang	Capaian awal (baseline)
2021	0.45	Kurang	14 PKSN kategori cukup, 4 kategori kurang
2024	0.52	Cukup (target RPJMN)	Masih dalam proses pengukuran

Sumber: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), 2025

Meski mengalami kenaikan tipis, beberapa kawasan perbatasan masih tergolong **berkатегорi kurang**, yang mencerminkan tantangan serius dalam infrastruktur dasar, tata kelola, dan akses layanan publik, keamanan dan pengawasan, serta kelembagaan dan aktivitas lokal masyarakat.

Tantangan Pengelolaan Kawasan Perbatasan

1. Ketimpangan Infrastruktur dan Aksesibilitas

Ketimpangan infrastruktur dan aksesibilitas di kawasan perbatasan Indonesia masih menjadi hambatan utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyak wilayah, khususnya di Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), belum terhubung secara memadai dengan jalan nasional atau provinsi.

2. Keamanan Perbatasan dan Ancaman Non-Tradisional

Tindak penyelundupan, perdagangan ilegal, dan kejahatan lintas negara masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Pengawasan di wilayah perbatasan belum optimal, diperburuk oleh banyaknya jalur perlintasan tidak resmi yang sulit diawasi. Selain itu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan minimnya dukungan teknologi juga menghambat penyelenggaraan pelayanan lintas batas, termasuk dalam pelaksanaan fungsi CIQS (*Customs, Immigration, Quarantine, and Security*) (BNPP, 2024).

3. Koordinasi dan Tata Kelola Lintas K/L

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar kementerian/lembaga dalam pembangunan kawasan perbatasan masih belum optimal. Kewenangan BNPP terbatas pada fungsi koordinatif, tanpa otoritas eksekusi langsung atas program lintas sektor.

4. Tata Ruang dan Pengembangan Industri di Kawasan Perbatasan

Hingga saat ini, proses penyusunan dan penetapan rencana pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan masih belum rampung. Pengelolaan potensi komoditas lokal dan pengembangan pusat industri di daerah perbatasan juga dinilai belum optimal. Sebagai contoh Pengembangan pusat industri dan perdagangan di kawasan perbatasan seperti Lokasi Prioritas (Lokpri) dan Pusat Kawasan Nasional (PKSN) masih belum maksimal.

Pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia masih menghadapi tantangan kompleks, baik dari sisi infrastruktur, tata kelola, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Nilai IPKP yang stagnan di angka 0,45 mencerminkan perlunya reformasi menyeluruh pada pendekatan pembangunan perbatasan. Pemanfaatan IPKP sebagai instrumen evaluatif dan alokasi anggaran berbasis capaian indeks menjadi salah satu kunci keberhasilan, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil dan kompleksitas kawasan perbatasan. Diperlukan

komitmen lintas sektor dan penguatan koordinasi pusat-daerah agar kawasan perbatasan benar-benar menjadi simbol kedaulatan sekaligus pusat pertumbuhan baru Indonesia.

Referensi

- BNPP. 2023. BNPP Dorong Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara, diakses dari <https://bnpp.go.id/berita/bnpp-dorong-percepatan-pembangunan-kawasan-perbatasan-negara>. 6 Agustus 2025.
- BNPP. 2024. BNPP Bahas Penyusunan Indikator dan Variabel IPKP Pada 22 PKSN Tahun 2025-2029, diakses dari <https://bnpp.go.id/berita/bnpp-bahas-penyusunan-indikator-dan-variabel-ipkp-pada-22-pksn-tahun-20252029>. 4 Agustus 2025.
- BNPP. 2024. BNPP Bahas Rancangan Awal Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2025-2029, Ini Hasilnya! , diakses dari <https://bnpp.go.id/berita/bnpp-bahas-rancangan-awal-rencana-induk-pengelolaan-perbatasan-negara-20252029-ini-hasilnya>. 8 Agustus 2025.
- BNPP. 2024. BNPP Laksanakan Evaluasi Capaian Rencana Aksi Pengelolaan Infrastruktur Fisik di Kawasan Perbatasan Tahun 2024 , diakses dari <https://bnpp.go.id/berita/bnpp-laksanakan-evaluasi-capaian-rencana-aksi-pengelolaan-infrastruktur-fisik-kawasan-perbatasan-tahun-2024>. 8 Agustus 2025.
- BNPP. 2024. Reformasi Pos Lintas Batas Negara 2014-2024.
- BNPP. 2024. Rencana Aksi Infrastruktur Fisik: Jalan Perbatasan Masih Jadi Fokus, 84 Proyek Desa Selesai, diakses dari <https://bnpp.go.id/berita/rencana-aksi-infrastruktur-fisik-jalan-perbatasan-masih-jadi-fokus-84-proyek-desa-selesai>. 8 Agustus 2025.
- BNPP. 2025. 204 Kecamatan di Perbatasan Negara Jadi Prioritas Pembangunan 2025 – 2029, <https://bnpp.go.id/berita/204-kecamatan-di-perbatasan-negara-jadi-prioritas-pembangunan-2025-2029>. 6 Agustus 2025.
- BNPP. 2025. BNPP Akan Terjun Langsung Ukur Indeks Pengelolaan Perbatasan Negara, diakses dari <https://bnpp.go.id/berita/bnpp-akan-terjun-langsung-ukur-indeks-pengelolaan-perbatasan-negara> . 5 Agustus 2025.



Analisis **PAGU ANGGARAN** 2025



PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 6
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.bk.dpr.go.id